



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

**Jalan Antara Nomor 445 Bengkalis**

**Website : [www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id](http://www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id)**

**Email : [kesbangpolbks@yahoo.com](mailto:kesbangpolbks@yahoo.com)**



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja ini juga sebagai upaya tindak lanjut jawaban dari rekomendasi yang sebelumnya diberikan oleh TIM SAKIP Kabupaten Bengkalis.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 dan analisisnya. Meskipun masih terdapat kekurangan, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran berikutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. HERMANTO, M.M.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630310 198702 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang..... 4
B.	Maksud dan Tujuan..... 5
C.	Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi..... 5
D.	Isu Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 7
E.	Struktur Organisasi..... 9
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>
A.	Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ..... 12
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 13
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
A.	Pengukuran Kinerja Organisasi ..... 15
B.	Realisasi Anggaran..... 25
C.	Analisis Efisiensi..... 26
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>
	35

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagai Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis beralamat di Jalan Antara Nomor 445 Bengkalis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat

- beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 5 (Lima) sasaran dan terdapat 6 (Enam) indikator kinerja sasaran untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai, yaitu dari 5 (Lima) indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (empat) indikator kinerja utama dengan capaian baik dan realisasi melebihi target kinerja namun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum maksimal capaiannya.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis serta dorongan dan dukungan dari pimpinan dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat



beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026
3. Penetapan Kinerja Tahun 2022

## **D. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam upaya mencapai visi misi serta tujuan strategis ditemukan kondisi kecenderungan dan perkembangan situasi dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan permasalahan di daerah yang mengarah pada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan utama (strategic issued) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yaitu :

### **1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan**

1. Perkembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan saat ini sudah cukup memprihatinkan, ditandai dengan semakin mudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya para generasi muda yang jika berkelanjutan, dikhawatirkan dapat menjerumuskan kejurang kehancuran. Banyak kasus-kasus penyimpangan ideologi di pulau Jawa turut mempengaruhi kondusifitas di Kabupaten Bengkalis. Menyikapi permasalahan ideologi tersebut, terbit Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila pada semua elemen masyarakat. Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Rendahnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa serta kurangnya wawasan kebangsaan yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang mengganggu stabilitas daerah.

4. Kewaspadaan kemungkinan timbulnya konflik antar etnis dan suku bangsa terkait pembauran kebangsaan khususnya kerukunan antar Etnis dan Suku Bangsa di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Menyikapi kemungkinan timbulnya konflik etnis dan suku bangsa maka terbitlah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

## **2. Bidang Politik Dalam Negeri**

1. Terkontaminasinya pola pikir, sikap dan perilaku generasi muda akibat interaksi budaya global yang berdampak pada gaya hidup, kesadaran berpolitik, pelaksanaan hak dan kewajiban serta wawasan kebangsaan.
2. Partisipasi politik masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Terbatasnya masyarakat yang memahami kebijakan politik

## **3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat**

1. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah, sehingga kurang mencintai kebudayaan dan seni budaya daerah.
2. Dukungan dari stakeholders dan pemangku kepentingan dalam upaya pembentukan BNN Kabupaten Bengkalis.
3. Koordinasi Tim P4GN Kabupaten Bengkalis, terbit Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
4. Belum optimalnya koordinasi dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Masih banyak Organisasi Kemasyarakatan yang belum terdaftar keberadaannya.

## **4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

1. Belum efektivitas penanganan konflik sosial secara terkoordinir dan terpadu dalam melaksanakan rencana aksi daerah.

2. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah terutama terkait dengan paham radikal dan teroris, aksi/demo unjuk rasa yang anarkis, aliran sesat keagamaan, pertikaian antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan kewaspadaan nasional dan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dengan tidak lanjut membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
3. Peningkatan peran serta dan ikut sertanya para tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara.
4. Peningkatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Peningkatan sinergitas lintas instansi vertikal di daerah dan SKPD terkait dengan kegiatan Keintelijenan dalam rangka mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini untuk menjaga stabilitas nasional di daerah. Tindak lanjut dari kondisi ini diberlakukannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat.

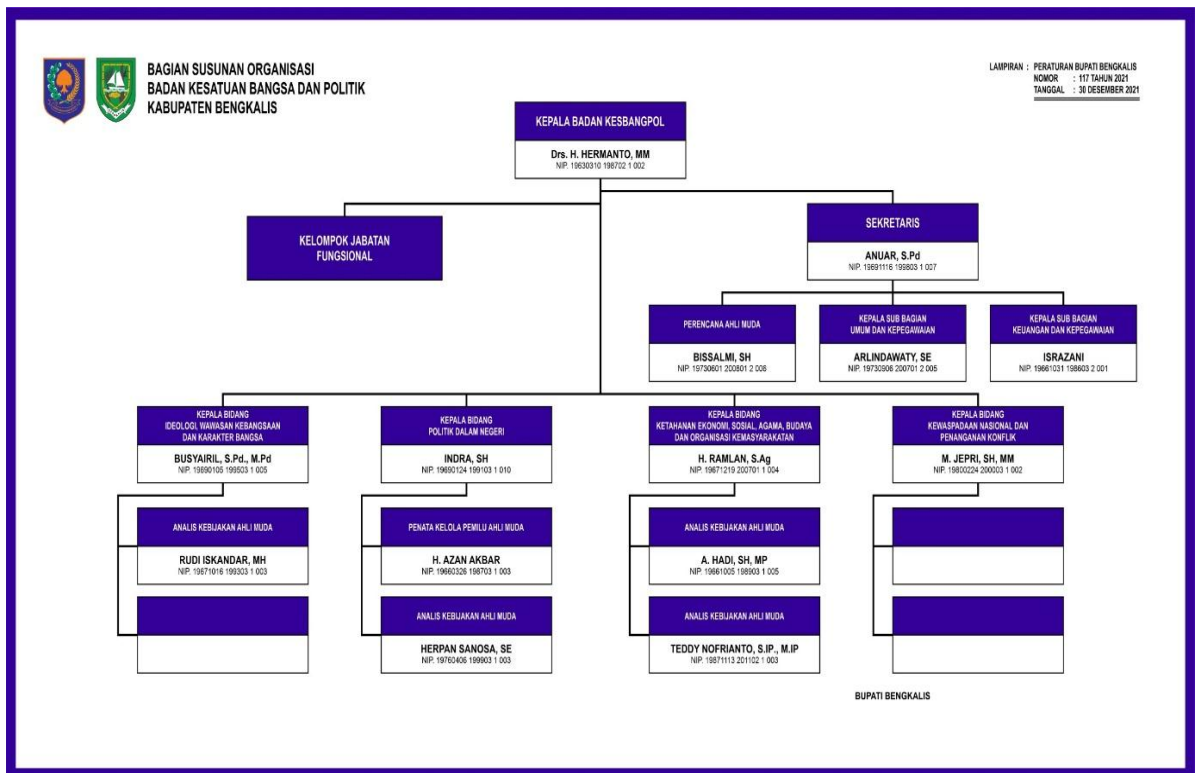
#### **E. Struktur Organisasi**

Adapun susunan organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :

- Perencana Ahli Muda
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
- Analis Kebijakan Ahli Muda
  - Analis Kebijakan Ahli Muda
- d. Bidang Politik, terdiri dari :
- Analis Kebijakan Ahli Muda
  - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
- Analis Kebijakan Ahli Muda
  - Analis Kebijakan Ahli Muda
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
- Analis Kebijakan Ahli Muda
  - Analis Kebijakan Ahli Muda

Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat digambarkan sebagai berikut :



## 1.1 Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek Startegis Organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

### Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Kinerja
- C. Realisasi Anggaran
- D. Analisis Efisiensi

## **Bab IV Penutup**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja dapat memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen segenap aparatur dan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bengkalis.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang komendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Meningkatnya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	10%	10%	10%	10%	10%	10%

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja yang disusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100 Orang
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	Persentase partisipasi politik masyarakat	70%
3.	Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan	1	Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100 Orang
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	1	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	10%
5.	Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik	1	Predikat akuntabilitas kinerja	BB
		2	Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### **A. Pengukuran Kinerja Organisasi**

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran Kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya perangkat daerah/organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dengan menghitung persentase (%) capaian target indikator kinerja, dengan rumus :  $\% \text{ capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$ .

Dalam laporan kinerja diharap dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2022.

## 1. Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Realisasi s/d Tahun 2022	Target Akhir Tahun (2021) Renstra
			Target	Realisasi	2021	Target	Realisasi	Capaian		
1	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	80%	80%	100%	100 Orang	470 Orang	470%	470%	100 Orang
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	55%	71,75%	130%	70%	71,75%	130%	130%	70%
3	Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	80%	40%	50%	100 Orang	60 Orang	60%	60%	100 Orang
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	70%	10%	14,2%	10%	65%	6,5%	6,5%	70%
5	Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik	Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada realisasi dan capaian kinerja diatas namun terdapat 1 indikator atau target kinerja yang masih rendah realisasi dan capaian sebesar 60% sampai tahun 2022 karena adanya kebijakan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penganggaran kebutuhan penanganan Covid 19 dan proyeksi hasil pendapatan daerah menurun.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

## Sasaran 1

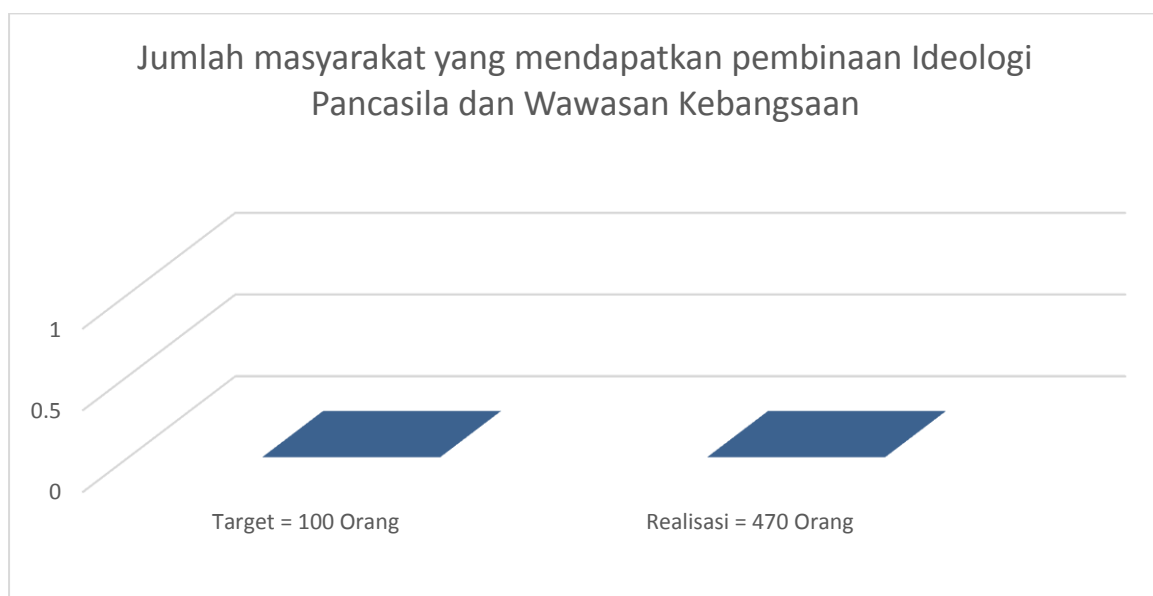
### ***Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan***

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100 Orang	470 Orang	470%
Rata-Rata Capaian			470%

Untuk pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada Tabel diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk sasaran Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dengan indikator yaitu Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Untuk indikator ini realisasi kinerja sebanyak 470 Orang sehingga terdapat capaian kinerja melebihi target 100 Orang menjadi 470 Orang dengan penambahan menjadi 370 Orang/470%.

Adapun capaian kinerja sasaran Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran 1 yaitu Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tahun 2022, realisasinya mencapai 470 Orang dari target yang ditentukan sebesar 100 Orang atau capaian pada tahun 2022 menunjukkan capaian 470%. Dapat dilihat realisasi target indikator ini pada tahun 2022 adalah sangat baik.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Pada sasaran Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dilihat pada hasil capaiannya. Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2022 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran 1 karena sasaran dan indikator ini masuk menjadi Indikator Kinerja Utama OPD.

Disamping itu juga dukungan semua pihak terutama stakeholders terkait termasuk anggaran pelaksanaan kegiatan juga tersedia sesuai jadwal kegiatan.

### **Sasaran 2**

#### ***Meningkatnya partisipasi politik masyarakat***

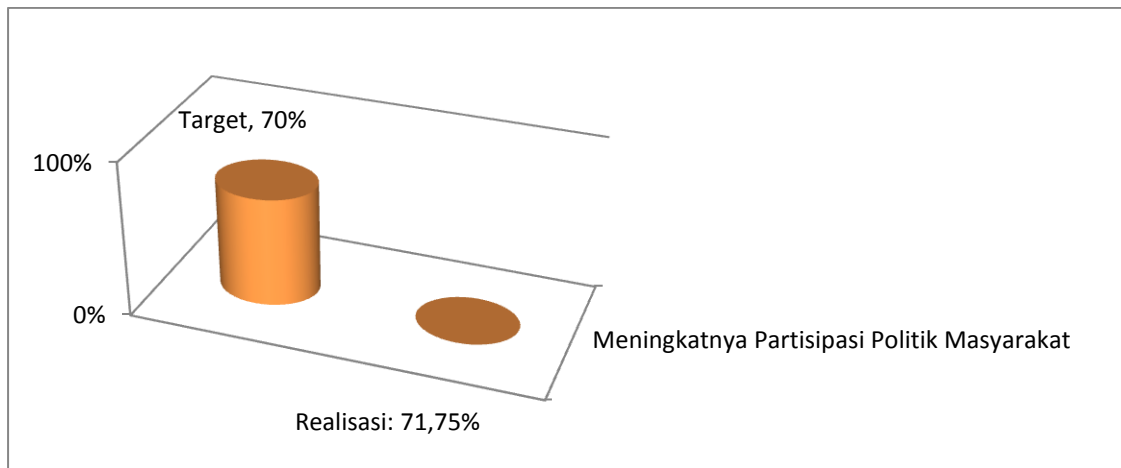
<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Persentase partisipasi politik masyarakat	70%	71,75%	103%
Rata- Rata Capaian			103%

Untuk pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada Tabel diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk sasaran Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dengan indikator yaitu Persentase partisipasi politik masyarakat, masih sama capaian kinerja pada indikator ini pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 71,75% karena persentase ini adalah perolehan hasil pemilukada tahun 2019 dan

akan dihitung kembali capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 yang akan datang sesuai hasil pelaksanaan pemilukada serentak nanti.

Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dengan indikator Persentase partisipasi politik masyarakat dengan rata-rata capaian pada sasaran ini sebesar 103%, hal ini terjadi dengan dilakukannya berbagai upaya dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dan didukung oleh stakeholders serta pemangku kepentingan dan masyarakat serta dukungan anggaran agar meningkatnya pendidikan politik masyarakat. Adapun upaya tersebut seperti dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui media, baik media elektronik dan publikasi (baliho, spanduk, banner) yang dipasang pada lokasi strategis di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Dari capaian indikator ini dapat disimpulkan bahwa indikator ini berhasil dengan baik dilihat dari peningkatan peran aktif dan partisipasi politik masyarakat terhadap proses Pemilu.

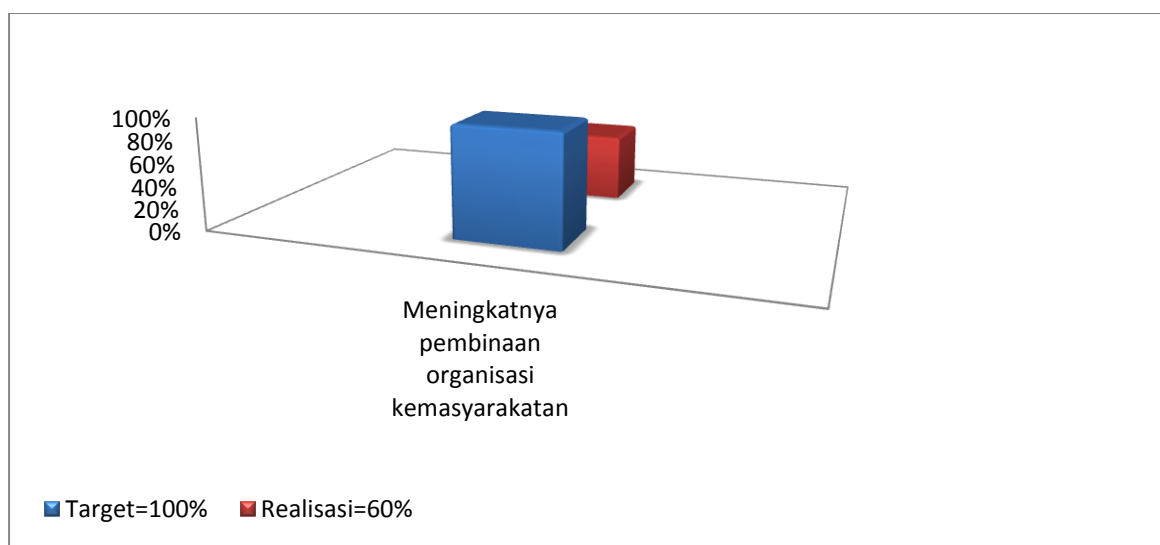
**Sasaran 3****Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	60 Orang	60%
Rata-Rata Capaian			60%

Untuk pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada Tabel diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

- Untuk sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan dengan indikator Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan, capaian kerjanya yaitu 60% atau hanya dilakukan pembinaan kepada 60 orang saja dengan lokus 2 (dua) Kecamatan yaitu di kecamatan Bengkalis dan Bathin Solapan masing-masing peserta sebanyak 30 orang. Semula target 100 orang tidak terealisasi karena adanya kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta proyeksi penurunan pendapatan tahun 2022 sehingga target untuk sasaran ini diusulkan kembali pada tahun anggaran 2023.

Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :





Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan dengan indikator Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan terdapat realisasi 60 Orang dari target 100 Orang dengan capaian sebesar 60%. Kegiatan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2022 dilaksanakan pada 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Bantan dan Bathin Solapan.

### **Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan**

Karena kebijakan perubahan rencana penganggaran kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 serta proyeksi penurunan pendapatan tahun 2022 sehingga target untuk sasaran ini diusulkan kembali pada tahun anggaran 2023.

#### **Sasaran 4**

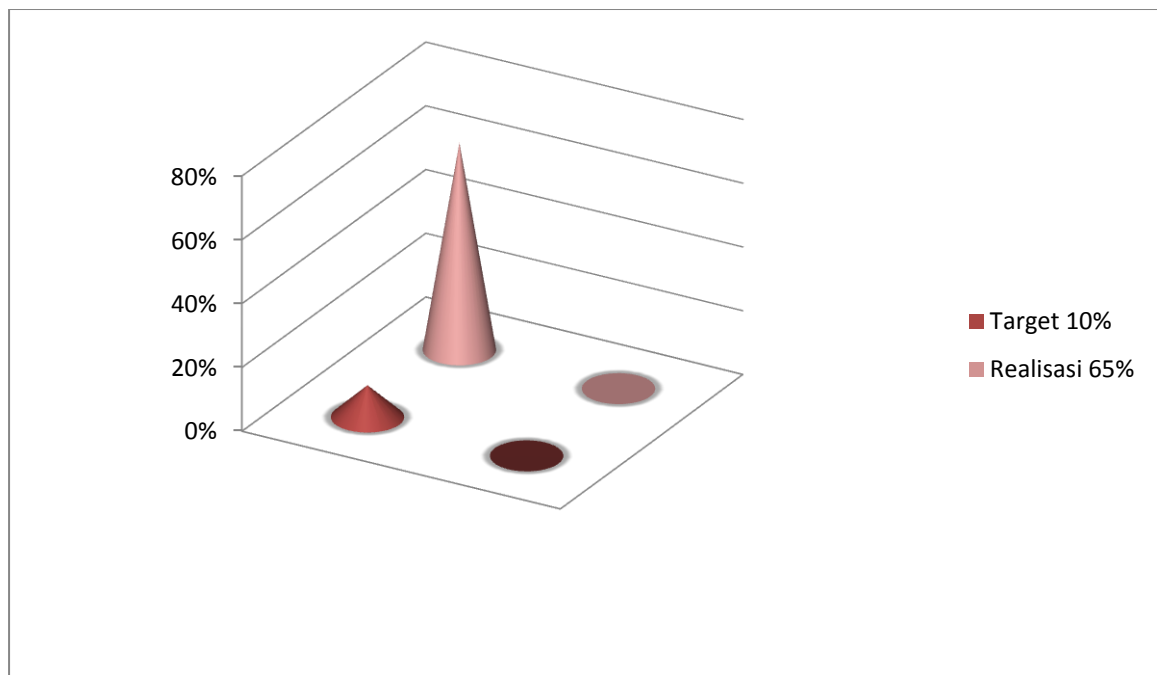
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	10%	65%	6,5%
Rata-Rata Capaian			6,5%

Untuk pencapaian sasaran 4 dapat dilihat pada Tabel diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

4. Untuk sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dengan indikator Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika, capaian kerjanya yaitu 6,5% dengan artian bahwa pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika telah dilakukan agar masyarakat mendapat pemahaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Data yang diperoleh dari Polres Bengkalis tahun 2022 kasus tindak pidana narkotika sebanyak 189 kasus sedangkan jumlah narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 308 terdiri dari penghuni pria sebanyak 291 orang, penghuni Wanita 14 orang dan penghuni anak-anak 3 orang. Dapat disimpulkan bahwa adanya realisasi sebesar 65% melebihi target sebesar 10% terhadap indikator Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan

narkotika adalah komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan pihak penegak hukum dan dukungan dari masyarakat. untuk memberantas peredaran gelap narkotika dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dengan indikator Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika terdapat realisasi sebesar 65% dengan capaian sebesar 6,5%. Hal ini dikarenakan terdapatnya dukungan anggaran dan seluruh stakeholders pada kegiatan yang fokus untuk pembinaan kepada masyarakat dengan artian bahwa pembinaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika telah dilakukan agar masyarakat mendapat pemahaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Keseriusan Pemerintah Daerah dan adanya dukungan oleh aparat penegak hukum serta dipertegas lagi dengan adanya pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa

(TMMD) Tahun 2022 sehingga sangat membantu suksesnya kegiatan ini ditegah-tengah masyarakat.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Pada sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, rata-rata capaiannya sudah baik, hal ini dikarenakan Keseriusan Pemerintah Daerah, dukungan oleh aparat penegak hukum dan segenap masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis serta melalui pelaksanaan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti dilakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya peredaran narkoba dan miras dan dukungan FPK, FKDM, FKUB Kabupaten Bengkalis yang langsung dilaksanakan sampai ke wilayah desa. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat mendapatkan pembinaan dan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Kembali pada Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2022 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran ini.

## **Sasaran 5**

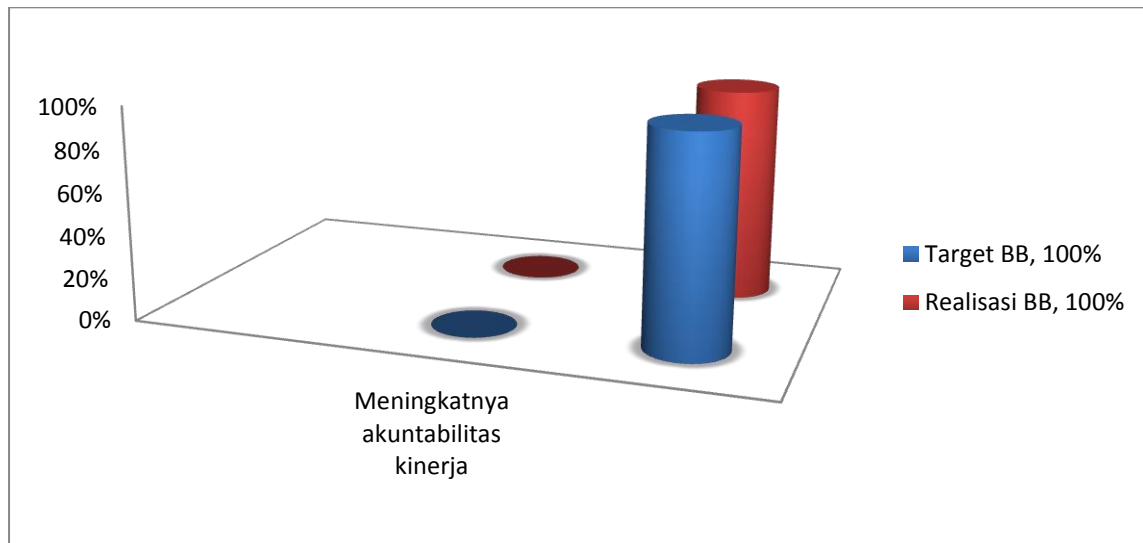
### **Meningkatnya akuntabilitas kinerja**

Indikator	2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Predikat akuntabilitas kinerja	BB	BB	100%
Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			200%

Untuk pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada Tabel diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

5. Pencapaian untuk sasaran Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik dengan indikator sebagai berikut :
  - a. Predikat Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja BB. Untuk realisasi indikator sasaran ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dengan predikat BB, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti. Untuk realisasi indikator sasaran ini sesuai target dan realisasi yaitu 100%.

Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatkan manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik realisasi adalah BB dengan capaiannya 100%, Pada Tahun 2019 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis masuk kelompok 10 (sepuluh) besar OPD yang mendapat Predikat B dengan Nilai 61,22. Pada Tahun 2020 kembali mendapat Predikat B dengan Nilai 61,43 dan pada tahun 2021 realisasi untuk indikator Predikat akuntabilitas kinerja adalah BB dengan nilai 70,56. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sudah menunjukkan hasil yang **Baik** namun masih memerlukan perbaikan agar predikat tersebut dapat dipertahankan untuk tahun 2022 nanti. Untuk **Persentase temuan yang ditindaklanjuti** realisasi 100% dengan capaian 100% dan Badan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis masuk 10 (sepuluh) OPD yang telah menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

### Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada sasaran Meningkatkan manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik, rata-rata capaiannya sudah baik, untuk indikator Predikat akuntabilitas kinerja dengan capaian BB dan untuk indikator Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti 100%, hal ini dikarenakan adanya komitmen seluruh jajaran ASN mendukung pemenuhan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama dan upaya meningkatkan kinerja pada sasaran ini.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja non gaji dan tunjangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6.115.326.424,- atau 85,88 % dari pagu sebesar Rp. 7.120.742.462,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran **Meningkatnya partisipasi politik masyarakat** yaitu sebesar 92,48%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran **Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba** yaitu 68,22%. Hal ini disebabkan adanya faktor antara lain : a. belum ada Perda dan Perbup P4GN sehingga SOP P4GN Kecamatan belum terbentuk, b. Jadwal kegiatan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan TMMD dan SDM yang terbatas pada bidang terkait tidak memungkinkan untuk persiapan administrasi maupun pertanggungjawaban kegiatan secara serentak.

**Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2022 sesuai sasaran sebagai berikut:**

Sasaran	Rata-Rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	470%	Rp. 816.777.100	Rp . 674.683.358	82,60
Persentase partisipasi politik masyarakat	71,75%	Rp. 224.709.000	Rp. 190.920.500	84,96
Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	60%	Rp. 120.623.100	Rp. 92.641.700	76,80
Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	6,5%	Rp. 532.541.200	Rp. 321.690.000	136,4
Total		Rp. 1.694.650.400,-	Rp. 1.279.935.558,-	380,76

## C. Analisis Efisiensi

### 1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

#### a. Sumber Daya Manusia

Komposisi PNS Badan Kesbangpol  
Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis  
Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Sekretariat	5	7	12
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	4	0	4
3.	Bidang Politik Dalam Negeri	3	3	6
4.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Masyarakat	3	1	4
5.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, kondisi bulan Desember 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 28 (dua puluh delapan ) orang PNS dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis, 17 orang (17%) adalah laki-laki dan 11 orang (13%) adalah perempuan. Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis belum merata, dari segi jumlah PNS yang hanya berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang untuk melaksanakan pelayanan pada suatu Badan dan masih terdapat kesenjangan antara jumlah PNS laki-laki dan perempuan.

### Komposisi PNS Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	Sekretariat	1	2	7	2
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	2	2
3.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	-	6	-
4.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	2	1
5.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	-	3	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>6</b>

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, kondisi bulan Desember 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan III, yaitu sebanyak 18 orang atau 18%, sedangkan Golongan I sebanyak 1 orang atau 1%, Golongan II sebanyak 3 Orang atau 3% dan Golongan IV sebanyak 6 orang atau 6%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

### Komposisi PNS Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	Eselon/ Fungsional		
		II	III	IV
1.	Sekretariat	1	1	3
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	1	1
3.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	1	2
4.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	2
5.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, kondisi bulan Desember 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 15 jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Terdapat kekosongan untuk 3 (tiga) jabatan di Eselon IV atau Pejabat Fungsional, karena sampai akhir tahun 2022 belum ada pengganti pada jabatan tersebut yang sebelumnya terisi namun terjadi kekosongan dengan berakhirnya masa tugas pejabat yang bersangkutan.

Komposisi PNS Badan Kesbangpol  
Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal Yang  
Ditamatkan

No	Unit Kerja	JUMLAH			
		SLTP	SMU	S1	S2
1	Sekretariat	1	3	7	1
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	2	2
3	Bidang Politik Dalam Negeri	-	2	4	-
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Masyarakat	-	1	1	2
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-		1	1
<b>TOTAL</b>		1	6	15	6

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, kondisi bulan Desember 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 15 orang atau sebesar (15%) disusul kemudian pendidikan SMA sebanyak 6 orang (6%) dan Tingkat Pendidikan Magister (S2) sebanyak 6 orang (6%) dan dengan tingkat pendidikan SMP hanya 1 orang (1%). Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan pada jumlah atau kuantitas PNS, namun upaya peningkatan kualitas PNS untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan kompetensi SDM di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.



Komposisi PNS Badan Kesbangpol  
Kabupaten Bengkalis Menurut Usia

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JUMLAH
		20- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	2	2	4	4	12
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	-	-	-	1	3	4
3	Bidang Politik Dalam Negeri	1	1	-	-		2	2	6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Masyarakat	-	-	1	-		1	2	4
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	-	-	-	1	1		2
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, kondisi bulan Desember 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh usia >50 tahun sebanyak 11 Orang (11%), diikuti usia 46-50 tahun yakni sebanyak 6 orang (6%) sedangkan selebihnya usia 41-45 tahun sebanyak 4 Orang atau (4%), usia 36-40 tahun sebanyak 3 orang (3%) dan usia 20-35 Tahun masing-masing sebanyak 1 orang (1%).

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Aset yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor. Terdapat total aset yang dimiliki sebanyak 617. Dari total tersebut, 569 aset memiliki kondisi yang baik, Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 48 aset.

Dari kondisi aset yang masih baik dapat dikemukakan bahwa terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pada bidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

Hanya saja kebanyakan sarana dan prasarana yang ada tersebut hasil pengadaan tahun 2017 sehingga perlu banyak perawatan dan pemeliharaan. Komposisi data tersebut juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

## 2. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa hanya 1 (satu) sasaran menunjukkan pencapaian 92,48%. Sedangkan untuk sasaran dibawah 100% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	6,5	68,22	61,22

Program pada sasaran Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan dari TMMD Tahun 2022 pada 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu dan Bandar Laksamana.

Sehingga jadwal kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis bersamaan dilakukan dengan sdm aparatur yang minim dengan berimbas kepada proses persiapan administrasi kegiatan sampai pada pengajuan dana kegiatan dan terakhir pertanggungjawaban dana kegiatan (SPJ) dikhawatirkan tidak selesai, sehingga kegiatan ditunda pelaksanaannya dan akan diusulkan Kembali pada APBD murni tahun anggaran 2023.

## 1.1 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 12.787.892.954,-** dengan **realisasi keuangan sebesar Rp. 10.840.052.309,-** atau **setara 77,84%**, sedangkan realisasi fisik **sebesar 99,36%**, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. *Anggaran Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* sebesar **Rp. 5.667.150.492-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.724.725.885,** atau sebesar 83,37%.
- b. *Anggaran Belanja selain Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* sebesar **Rp. 7.120.742.462,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.115.326.424,-** atau sebesar 85,88%.

Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>12,787,892,954</b>	<b>10,840.052.309</b>	<b>84,77</b>	<b>99.77</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8,287,705,654</b>	<b>7,026,229,260</b>	<b>86.83</b>	<b>100</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>279,081,000</b>	<b>239,808,300</b>	<b>88.76</b>	<b>100</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175,624,000	146,855,600	83.62	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.653.800	14,545,800	87,34	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8,141,700	7,323,300	89.95	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cpaiian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28,568,800	27,253,700	95.40	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,092,700	43,829,900	87.50	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,667,150.492</b>	<b>4,724,725,885</b>	<b>83.37</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,667,150,492	4,724,725,885	83.37	100
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>115,200,000</b>	<b>115,200,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	115,200,000	115,200,000	100	100
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>147,860,000</b>	<b>131,300,800</b>	<b>88,80</b>	<b>100</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147,860,000	131,300,800	88.80	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,098,100,200</b>	<b>1,032,623,984</b>	<b>84,41</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,930,000	6,410,200	64.55	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,016,900	77,297,700	92.00	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83,600,000	78,500,000	93.90	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84,601,300	56,235,800	66.47	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000	10,200,000	85.00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665,352,000	662,180,284	99.52	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	158,600,000	141,800,000	89.41	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>128,984,000</b>	<b>122,901,090</b>	<b>95.74</b>	<b>100</b>
Pengadaan Mebel	47,343,000	46,137,840	97.45	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,641,000	76,763,250	94.03	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>222,476,962</b>	<b>153,067,497</b>	<b>67.55</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74,500,000	36,100,000	48.46	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,864,202	96,175,577	80.24	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28,112,760	20,791,920	73.96	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>628,853,000</b>	<b>506,601,704</b>	<b>86.00</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288,849,000	208,236,313	72.09	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153,600,000	115.200.000	75.00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106,490,000	103,372,800	97.07	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79,914,000	79,792,591	99.85	100
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>962,418,200</b>	<b>775.186.249</b>	<b>68.30</b>	<b>100</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>962,418,200</b>	<b>775.186.249</b>	<b>68.30</b>	<b>100</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	816,777,100	696.546.949	82.60	100

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	145,641,100	78,639,300	54.00	100
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>1,852,071,200</b>	<b>1,818,164,700</b>	<b>98,17</b>	<b>100</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik</b>	<b>1,852,071,200</b>	<b>1,818,164,700</b>	<b>98,17</b>	<b>100</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di Daerah	224,709,000	190,920,500	84.96	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di Daerah	1,627,362,200	1,627,244,200	99.99	100
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>184,964,900</b>	<b>138,772,500</b>	<b>75,03</b>	<b>100</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>184,964,900</b>	<b>138,772,500</b>	<b>75,03</b>	<b>100</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120,623,100	92,641,700	76.80	100
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	64,341,800	46,130,800	71.70	100
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>662,541,200</b>	<b>498.196.000</b>	<b>75,19</b>	<b>96,16</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>662,541,200</b>	<b>498.196.000</b>	<b>75,19</b>	<b>96,16</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	369,541,200	250,765,900	67.86	92.31
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	293,000,000	247.430.100	84,45	100
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>838,191,800</b>	<b>583.503.600</b>	<b>69,61</b>	<b>100</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>838,191,800</b>	<b>583.503.600</b>	<b>69,61</b>	<b>100</b>

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	244,799,700	224.075.500	91,53	100
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	593,392,100	359,428,100	60.57	100

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022 bila dilihat tabel diatas, sudah mencapai kinerja maksimal baik untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Namun penyerapan anggaran apabila dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan khusus pada beberapa sub kegiatan belum terealisasi sesuai target kineja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Hal ini terkait adanya Kebijakan Perubahan Perencanaan Anggaran sebagai akibat adanya penurunan proyeksi belanja daerah sebagai faktor external dan kurangnya SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai faktor internal sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan jadwal kegiatan awal, disamping itu juga belum adanya regulasi dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Keputusan Bupati Bengkalis untuk pelaksanaan kegiatan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan secara optimal, apabila dilihat dari rata-rata capaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja pada Badan Kesbang dan Politik antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran ASN Badan Kesbang dan Politik yang berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang sebelumnya telah ditentukan. Namun demikian untuk tahun 2023, Badan Kesbang dan Politik tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis perlu dukungan dan komitmen secara aktif semua pihak sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai bukti nyata komitmen penerima amanah bukan hanya menjadi wacana dan polemik pemikiran semata-mata.
2. Optimalisasi mekanisme internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun mendatang harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga diharapkan permasalahan yang muncul dapat diminimalisir agar tidak mempengaruhi realisasi maupun capaian indikator kinerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas Program dan kegiatan khususnya dengan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
5. Dilakukan upaya-upaya guna mengantisipasi hambatan/masalah yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :
  - a). Kecermatan dalam perencanaan dan diikuti pengawasan yang ketat agar sinkronisasi antara rencana kegiatan dan anggaran lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
  - b). Komitmen dari pejabat yang telah mengikat diri dalam Perjanjian Kinerja bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk benar-benar mengimplementasikan indikator program dan sasaran kegiatan masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan.
  - c). Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga penetapan kinerja dapat didukung oleh informasi dan data lapangan yang lebih akurat.
  - d). Terkait penyelenggaraan program dan kegiatan harus selaras, efisiensi, efektifitas dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
  - e). Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, sosialisasi, bimtek dan workshop terhadap perubahan ketentuan dan peraturan.